

Dinamika & Tantangan Praktik Penegakan Hukum SDA di Kalimantan Timur

Mohamad Nasir

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

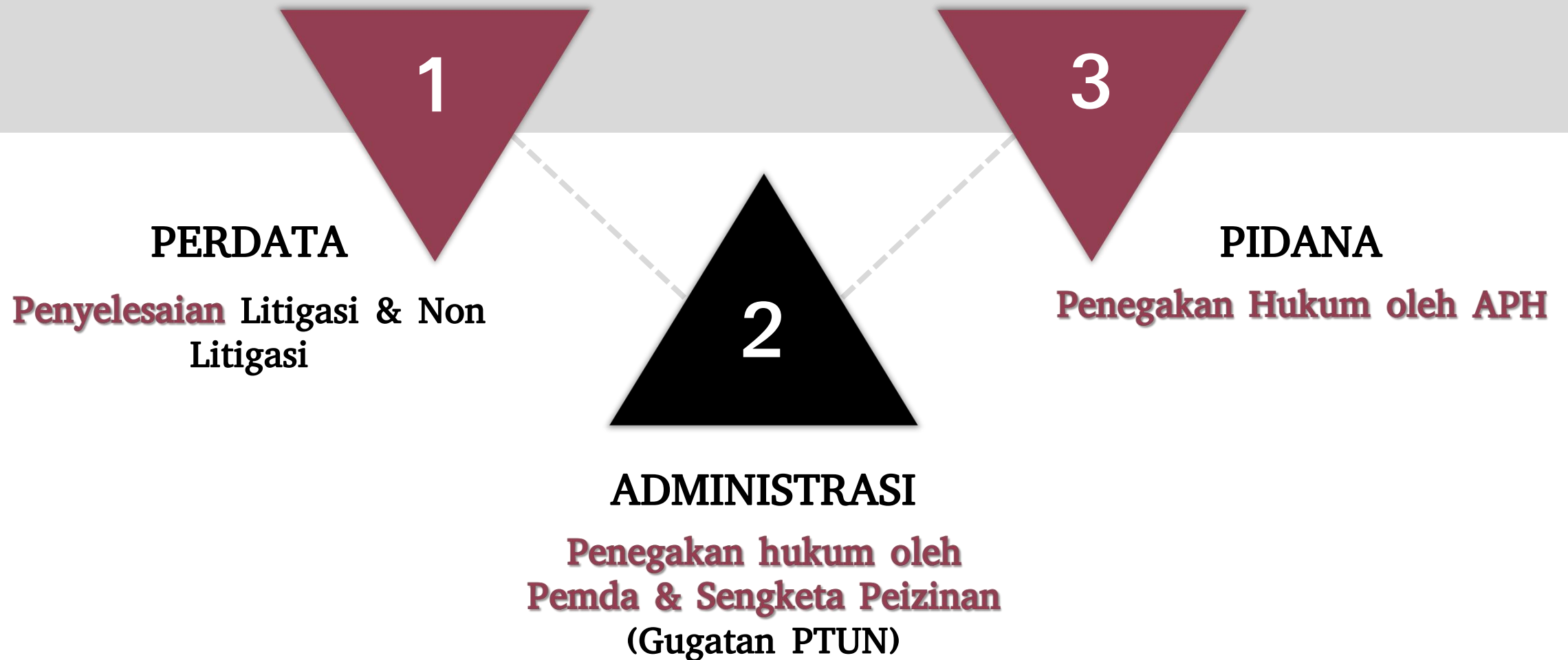
PERIZINAN (SDA)

- Mengontrol Kegiatan
- Memastikan Alokasi Ruang (lahan)

- Mengakibatkan Kerusakan LH
- Memicu Konflik (Lahan & LH)



Penegakan Hukum





PERDATA



**Desa
Mulawarman**

Non Litigasi

**Dusun
Sungkai
Nangka,
Kel. Teluk
Dalam**

Litigasi



Desa Mulawarman, Kutai Kartanegara

1

**Luas: 18.008
Ha**

2

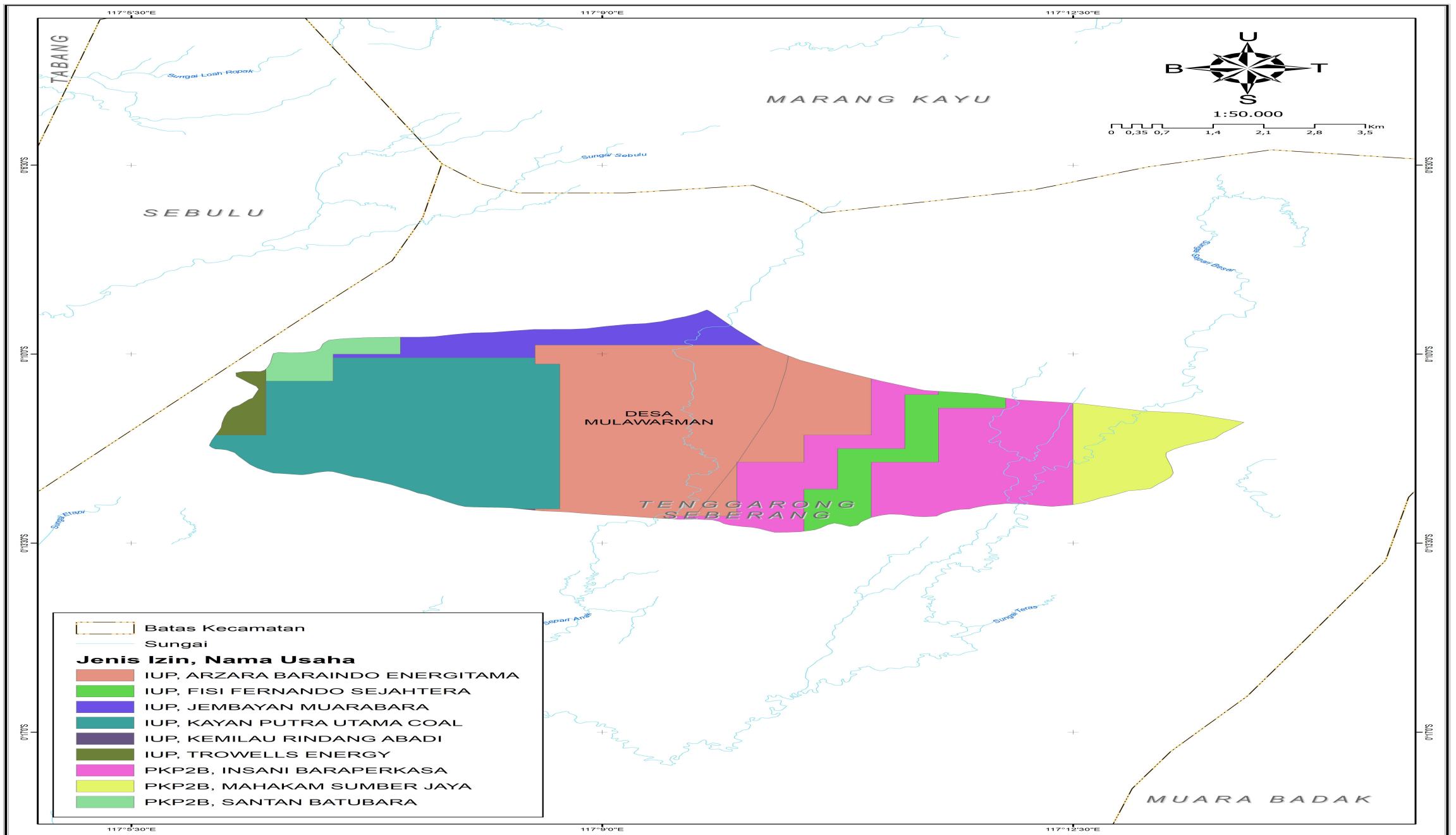
**Kawasan
Hutan: 15.628
ha (87%) and
APL: 2.380 ha
(13%)**

3

**Persawahan: 526
Ha
Permukiman:
2000 Ha**

4

**Desa
Transmigrasi
(1981).**



**Areal Persawahan Tersisa: 6
Ha (dari 560 Ha)**

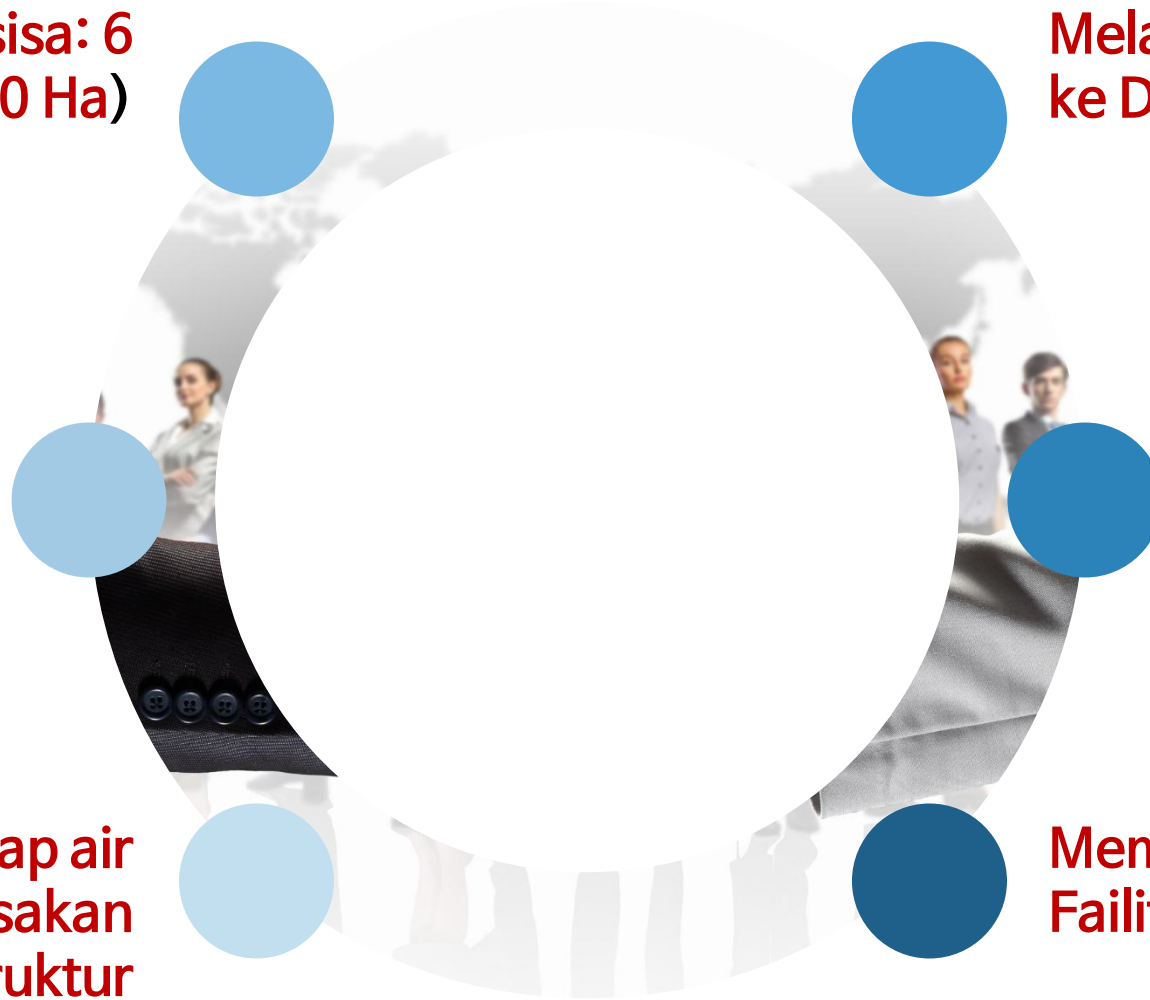
**Melaporkan pencemaran
ke DLH Kabupaten (2008)**

**Areal Permukiman 85 Ha
(dari 2000 Ha)**

**Melapor Ke Komnas HAM,
KSP (2017)**

**ISPA, Akses terhadap air
bersih, kerusakan
infrastruktur**

**Meminta Relokasi (2010),
Failitasi Pemprov (2018–2019)**





Dusun Sungai Nangka, Kel. Teluk Dalam, Kutai Kartanegara

1

**Dibuka tahun
1970**

2

**Dihuni 27
Keluarga**

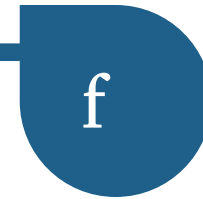
3

Tahun 2014: 4 KK.

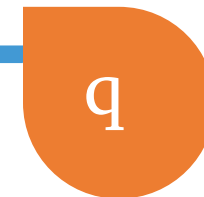
4

**PT. PKU
(2006/Sawit) &
PT Kutai Energi
(2009/Batubara)**

**Konflik Penguasaan
Lahan berlangsung
lama**



**Gugatan Kelompok
warga vs Kelompok
Tani (2019)**



**Pencemaran Air
(sungai dan sumur
warga, 2015 & 2019)**



ADMINISTRASI

Gugatan di PTUN

Tambang vs Tambang

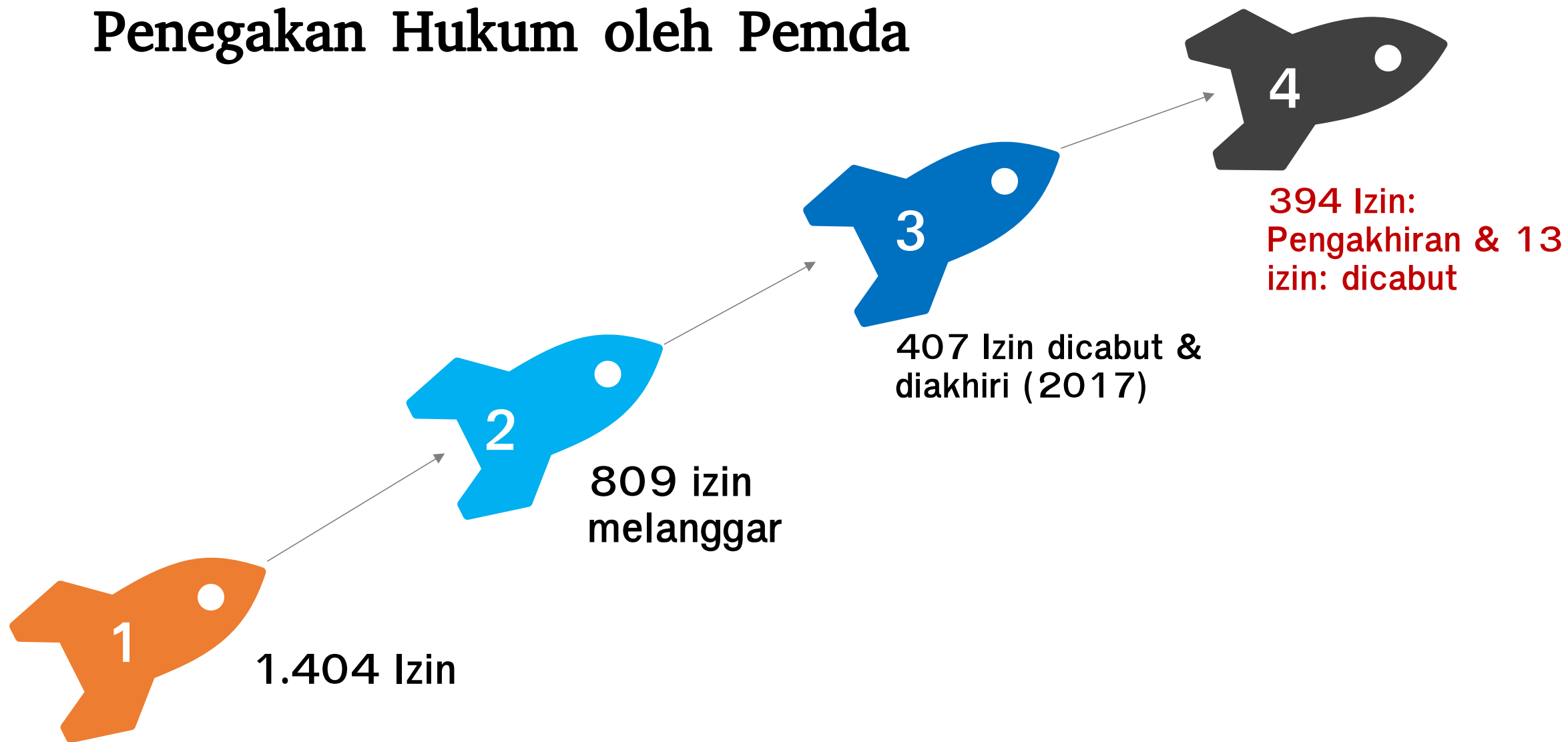
Periode 2009 – 2019
Terdapat 18 Gugatan TUN

Tambang vs Sawit

Periode 2009 – 2019
Terdapat 10 Gugatan TUN



Penegakan Hukum oleh Pemda





PIDANA



Kasus SDA & LH

1.

Penambangan tanpa izin

2.

Penebangan Liar

3.

**Pencermaran & Perusakan
LH**

Hambatan

1

Masih adanya keterlibatan oknum-oknum

2

Minimnya Sarpras Lidik - Sidik

3

Rasio luas wilayah (20.865.744 Ha,) -- Jml Penduduk (3.721.389 Jiwa,) -- Personel Polri Polda Kaltim (\pm 9.000 orang/) : idealnya 14.000 orang

4

Penanganan kejahatan SDA sangat bergantung kepada Ahli dibidangnya masing-masing;



**TANTANGAN
PENEGAKAN HUKUM DI
KALTIM**

SUBSTANSI

Aturan yang ambigu, inkonsisten dan tidak lengkap

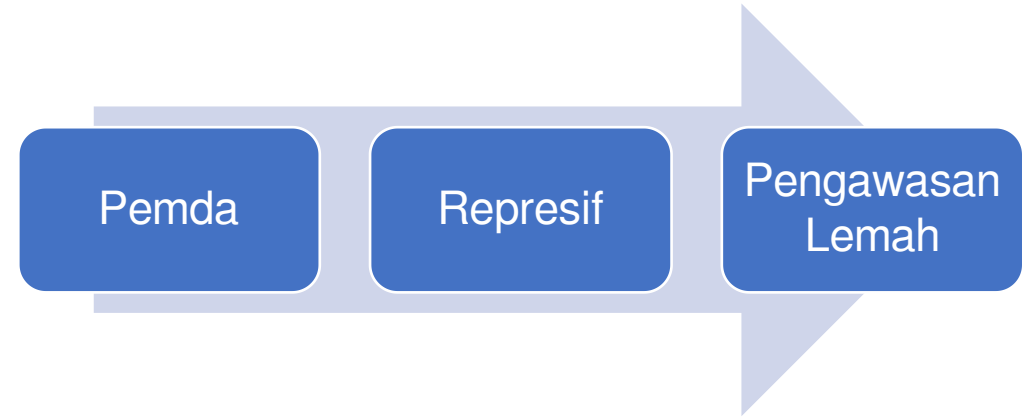
Perda RTRW Kaltim 2015–2035:

mengalokasi ruang untuk Kawasan Budiaya: 10,451,331 Ha

Peruntukan	Luas
Hutan Produksi	6.055.793 Ha
Perkebunan dan Pertanian	3.681.657 Ha
Perikanan	187.304 Ha
Industri	57.176 Ha
Permukiman	97.442 Ha
Pariwisata	396.266 Ha
Pertambangan	5.227.136 Ha
Total	15.702.774 Ha

STRUKTUR

Penegakan Hukum (baik oleh Pemda maupun APH) yg cenderung represif dan normatif dalam memahami peraturan perundang-undangan



Penanganan Kasus: Anak meninggal di lubang bekas tambang (37 orang)

Alasan Penyidik:

- Keluarga korban keberatan utk dimintai keterangan / membuat laporan pengaduan(lp)
- Keluarga korban keberatan dilakukan otopsi
- Keluarga korban sudah mendapat ganti rugi dari pihak perusahaan (perdamaian);
- Dalam uu no. 4 thn 2009 ttg minerba tdk mencantumkan sanksi pidana hanya sanksi administrasi

BUDAYA

...juga
dipengaruhi
oleh Dinasti
Politik
*(trading in
influence)*



Keterkaitan perusahaan
dengan kerabat dan
“ring 1” penguasa lokal
berpengaruh pada
penegakan hukum

The background of the image is a composite of two business-related scenes. The foreground features a close-up of two hands shaking in a firm grip, with the sleeves of dark business suits visible. The background is a blurred group of about ten business professionals, both men and women, dressed in formal attire and standing together. Overlaid on this background is a thin blue rectangular border. Inside this border, the words "thank you!" are written in a large, bold, sans-serif font. "thank" is in black, and "you!" is in blue.

thank you!